

ABSTRAK

Skripsi ini penulis ingin menguraikan tentang kekuatan hukum akta perdamaian dalam sengketa perdata. Putusan perdamaian mempunyai arti penting dalam masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Apabila persengketaan berhasil diselesaikan dengan jalan berdamai kemudian disahkan dengan akta perdamaian kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi dari akta perdamaian. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana implementasi putusan akta perdamaian dalam sengketa perdata di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang Harta Bersama)? 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap akta perdamaian dalam sengketa perdata (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 1567/ Pdt. G/ 2017/ PA. SBY tentang Harta Bersama)?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *field research* yang bersifat *diskriptif analisis*. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Sumber data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama berbentuk kata-kata dan tindakan. Sumber data sekunder adalah data yang langsung dikumpulkan peneliti dalam bentuk dokumen-dokumen resmi dan referensi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa putusan akta perdamaian menjadi cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah persengketaan. Implementasi putusan akta perdamaian dalam sengketa perdata di Pengadilan Agama Surabaya berjalan dengan baik dan telah sesuai peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian bisa menjadi Undang-Undang yang mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Meskipun dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 harta bersama dibagi rata antara suami dan istri apabila perceraian tidak dapat dihindari, namun dalam kasus perkara nomor 1567/ Pdt. G/ 2017 PA. SBY dibagi menjadi tiga bagian antara suami, istri dan satu anak kandung yang masing-masing memperoleh 1/3 bagian dituangkan dalam akta perdamaian yang disepakati kedua belah pihak disahkan di Pengadilan Agama Surabaya melalui proses mediasi.

Kata Kunci: Hukum, Akta Perdamaian, Sengketa Perdata.

ABSTRACT

This thesis authors want to elaborate on the legal power of the deed of peace in civil disputes. Peace decisions have important meaning in society in general and especially for people seeking justice. If the dispute is successfully resolved by reconciliation then endorsed by a peace deed, both parties are punished to comply with the content of the peace deed. This study aims to answer the questions: 1) How is the implementation of the verdict of peace deed in civil dispute in Surabaya Religious Court (Case Study Decision Case No. 1567 / Pdt. G / 2017 / PA SBY on Joint Property)? 2) How is the legal review of the peace deed in civil disputes (Case Study of Decision Case No. 1567 / Pdt G / 2017 / PA SBY on Joint Property)?

This research is a type of research field research that is descriptive analysis. The research approach used is empirical juridical. The primary data source is data that is directly collected by researchers from the first source in the form of words and actions. Secondary data sources are data collected directly from research in the form of official documents and references.

The results of this study show that the verdict of the peace deed becomes the most effective way to resolve a dispute. Implementation of the verdict of the peace deed in civil disputes in the Religious Court of Surabaya run well and has been in accordance with applicable law. The results of this study indicate that the agreement can be a binding law for the parties to the agreement. Although in the Compilation of Islamic Law Article 97 shared wealth is shared equally between husband and wife if divorce is unavoidable, but in the case of the number 1567 / Pdt. G / 2017 PA. SBY is divided into three parts between husband, wife and one child who each get 1/3 of the parts poured in the peace deed agreed by both parties endorsed in Pengadilan Agama Surabaya through process of mediation.

Keywords: Law, Deed of Peace, Civil Dispute.